

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal yang
Dimoderasikan dengan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah
Provinsi di Indonesia**

Hafiza Azzahra, Achmad Fauzi, Tri Hesti Utamingtyas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

hafizaazzahra_1701618116@mhs.unj.ac.id, fau_smart@unj.ac.id, trihesti@unj.ac.id

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund on Capital Expenditure moderated by economic growth of Provincial Governments in Indonesia for the 2020-2023 period. The research method used is a quantitative method with secondary data obtained from the APBD budget realization report at the Directorate General of Financial Balance (DJPK) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Central Statistics Agency (BPS) with a sample of 136 provinces using a purposive sampling technique. Data analysis techniques used are descriptive statistical analysis, swimmer test analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, regression moderation analysis, and hypothesis testing. The results of the study partially indicate that Regional Original Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) have a significant positive effect on capital expenditure. While the Special Allocation Fund (DAK) has no effect on capital expenditure. Then, the results of the study partially also show that economic growth can moderate by strengthening the influence of Regional Original Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) on capital expenditure. Economic growth can also moderate but weaken the influence of Special Allocation Fund (DAK) on capital expenditure.

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, Economic Growth*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal yang dimoderasikan dengan pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2020-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran APBD pada Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah sampel sebanyak 136 provinsi menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji prasyarat analisis, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis moderasi regresi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Kemudian, hasil penelitian secara parsial juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi dengan memperkuat pengaruh (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi juga dapat memoderasi namun memperlambat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, serta mempunyai kondisi sosial budaya dan lingkungan yang berbeda, sehingga setiap daerah memerlukan penanganan yang berbeda pula. Otonomi daerah diperlukan bagi setiap daerah di Indonesia untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Otonomi daerah merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat (sentralisasi) kepada pemerintah daerah (desentralisasi), sehingga pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Kresna Pramudya et al., 2021). Salah satu perwujudan otonomi daerah adalah setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran secara administrasi maupun pemanfaatannya yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Jayanti, 2020). Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Maharani et al. (2024), kualitas layanan publik setiap daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi (aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana adalah belanja modal.

Menurut Kasdy et al. (2018), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Oleh karena itu, belanja modal tidak hanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi juga memiliki masa manfaat jangka panjang. Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja modal dengan penyerapan anggarannya. Perbandingan penyerapan anggaran dengan realisasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada seluruh provinsi di Indonesia yang diolah peneliti dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Belanja Modal

Belanja Modal	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pagu	Rp. 236.668,39 T	Rp. 196.815,17 T	Rp. 190.155,52 T	Rp. 213.478,06 T
Realisasi	Rp. 157.572,05 T	Rp. 167.354,14 T	Rp. 140.108,67 T	Rp. 210.024,77 T

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Data di atas menggambarkan bahwa realisasi anggaran belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2020-2023. Pada

tahun 2020, penyerapan anggaran belanja modal hanya 66,58% secara nasional. Selanjutnya di tahun 2021, penyerapan anggaran belanja modal mengalami kenaikan menjadi 85,03%. Pada tahun 2022, penyerapan anggaran belanja modal mengalami penurunan kembali menjadi 73,58%. Pada tahun 2023, penyerapan anggaran kembali meningkat menjadi 98,38% secara nasional. Menurut Abdullah Azwar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengatakan dalam rapat birokrasi dengan pemerintah daerah bahwa pelaksanaan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga lebih banyak mengeluarkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang sifatnya rutin, seperti belanja pegawai dan belanja barang jasa (www.menpan.go.id).

Kondisi keuangan pemerintah daerah semakin memburuk di tahun 2020 karena seluruh negara termasuk Indonesia terjangkit Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan (Tim JDIH BPK, 2020). Dampak dari pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Nomor 119/2813/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Keputusan ini meminta pemerintah daerah harus melakukan *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya mengenai rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50% dari anggaran untuk menangani pandemi COVID-19. Namun, adanya kebijakan ini seharusnya tidak mempengaruhi realisasi anggaran dari pagu anggaran yang sudah di realokasi. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia menuturkan bahwa anggaran belanja modal pada tiap daerah di Indonesia harus tetap terealisasi dengan maksimal, walaupun terjadi *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan belanja modal sesuai prioritas dan kebutuhan, terutama pada sarana prasarana kesehatan yang memiliki manfaat jangka panjang sehingga dapat digunakan tidak hanya pada saat pandemi COVID-19, tetapi juga pasca pandemi COVID-19 (pen.kemenkeu.go.id).

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, serta mengembangkan potensi daerahnya. Potensi daerah dapat dikembangkan dengan cara meningkatkan belanja modal. Menurut Azhar (2021), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang

memadai, sehingga dapat meningkatkan belanja modal (Himawan, 2022). Jadi, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi, maka semakin tinggi pula peluang bagi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Setiap daerah memiliki kemampuan yang tidak sama dalam memberikan dana untuk berbagai kegiatan operasional yang mengakibatkan ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah. Salah satu cara untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal (*fiscal gap*), sedangkan di sisi lain setiap daerah membutuhkan pendanaan daerah yang cukup besar, maka pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan (Huda & Sumiati, 2019). Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020-2023, dana perimbangan jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), artinya secara umum hampir seluruh provinsi di Indonesia belum mandiri dan masih bergantung dari dana pemerintah pusat yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan DBH (Dana Bagi Hasil).

Menurut Simanjuntak & Ginting (2019), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya diwujudkan melalui belanja modal. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal (Akita et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keadaan perekonomian dari suatu daerah yang diketahui melalui peningkatan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan daerah tersebut Cahyaning (2018). Pertumbuhan ini mencakup pertambahan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi wilayah suatu negara diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi acuan dalam mengukur perkembangan perekonomian di mana dihitung dari PDRB tahun tersebut yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal.

Pemaparan di atas menjadi pertimbangan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu adanya kebutuhan akan pembangunan dan sarana prasarana setiap daerah di Indonesia tidak dibarengi dengan peningkatan pagu dan realisasi anggaran belanja modal, kurang maksimal dalam menggali potensi daerah, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan objek pemerintah provinsi di Indonesia untuk menggambarkan keseluruhan pengaplikasian kebijakan anggaran untuk kepentingan rakyat di wilayah masing-masing secara umum. Pemilihan periode 2020-2023 dimaksudkan agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru, sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal yang Dimoderasikan dengan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal yang dimoderasikan dengan pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2020-2023. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran APBD pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data pertumbuhan ekonomi di *website* Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini juga menggunakan teknik *purposive sampling*. Berikut ini adalah sampel penelitian berdasarkan kriteria tersebut.

Tabel 2. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi di Indonesia yang menyerahkan Laporan Realisasi APBD dan dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari tahun 2020-2023.	34
2	Pemerintah Provinsi di Indonesia yang tidak menyajikan data Laporan Realisasi APBD secara lengkap terutama pada komponen PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal dari tahun 2022-2023.	(0)
3	Pemerintah Provinsi di Indonesia yang tidak memiliki data Pertumbuhan Ekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2020-2023.	(0)
Total Sampel		34
Periode Penelitian (2020-2023)		4
Total Observasi		136

Jumlah provinsi di Indonesia tahun 2020-2023 sebanyak 38 provinsi, namun hanya 34 provinsi yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Jumlah sampel yaitu jumlah provinsi di Indonesia dikalikan dengan empat periode anggaran, sehingga terdapat 136 sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji prasyarat analisis, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis moderasi regresi, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Pada analisis statistik deskriptif, peneliti dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (X1)	136	346864756506	49139745715234	5225566772832.28	8483357567759.318
DAU (X2)	136	671384345000	3998431715000	1714341888409.99	726888526204.917
DAK (X3)	136	110698383373	12853697316005	1854258171244.57	2182535962786.654
BM (Y)	136	176342548971	8857260068298	1283031167534.68	1263566961367.467
PE (M)	136	-9.34	20.22		4.03011
Valid N (listwise)	136				

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah provinsi di Indonesia selama periode tahun 2020-2023 (N) sebanyak 136 provinsi. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif setiap variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal (Y)

Pada variabel belanja modal memiliki nominal tertinggi (maksimum) sebesar Rp. 8.857.260.068.298 di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Sedangkan, nominal terendah (minimum) ada pada Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar Rp. 176.342.548.971. Rata-rata belanja modal yang dimiliki 34 provinsi dari tahun 2020-2023 adalah Rp. 1.283.031.167.535 dengan standar deviasi belanja modal sebesar Rp. 1.263.566.961.367. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) belanja modal lebih tinggi dari nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan variansi data tidak terlalu menyebar atau cenderung homogen. Hal ini mengartikan bahwa data variabel belanja modal mengindikasikan data berdistribusi secara normal atau merata, serta memiliki representasi yang baik untuk keseluruhan data.

2. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nominal tertinggi (maksimum) sebesar Rp. 49.139.745.715.234 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Sedangkan, nominal terendah (minimum) ada pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 346.864.756.506. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

dimiliki 136 provinsi adalah Rp. 5.225.566.772.832, namun standar deviasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 8.483.357.567.759. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dari nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) variasi atau sebaran data sangat tinggi. Hal ini mengartikan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar pemerintah daerah jauh berbeda satu sama lain, sehingga tingkat ketimpangan antar daerah tinggi.

3. Dana Alokasi Umum (X2)

Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nominal tertinggi (maksimum) sebesar Rp. 3.998.431.715.000 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Sedangkan, nominal terendah (minimum) ada pada Provinsi Bengkulu Tahun 2021 sebesar Rp. 671.384.345.000. Rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimiliki 136 provinsi adalah Rp. 1.714.341.888.410 dengan standar deviasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 726.888.526.205. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) belanja modal lebih tinggi dari nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan variansi data tidak terlalu menyebar atau cenderung homogen. Hal ini mengartikan bahwa data variabel belanja modal mengindikasikan data berdistribusi secara normal atau merata, serta memiliki representasi yang baik untuk keseluruhan data.

4. Dana Alokasi Khusus (X3)

Pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nominal tertinggi (maksimum) sebesar Rp. 12.853.697.316.005 di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Sedangkan, nominal terendah (minimum) ada pada Provinsi Bengkulu Tahun 2022 sebesar Rp. 110.698.383.373. Rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimiliki 136 provinsi adalah Rp. 1.854.258.171.244, namun standar deviasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 2.182.535.962.786. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih rendah dari nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) variasi atau sebaran data sangat tinggi. Hal ini mengartikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memang dialokasikan secara selektif dan tidak merata, sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

5. Pertumbuhan Ekonomi (M)

Pada variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai tertinggi (maksimum) sebesar 20,22% di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Sedangkan, nilai terendah (minimum) ada pada Provinsi Bali Tahun 2020 sebesar - 9,34%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 34 provinsi dari tahun 2020-2023 sebesar 3,49%, namun standar deviasi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01%. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi variasi atau sebaran data sangat tinggi. Hal ini mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2020-2023 tidak merata antar provinsi dengan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi.

Uji Asumsi Klasik

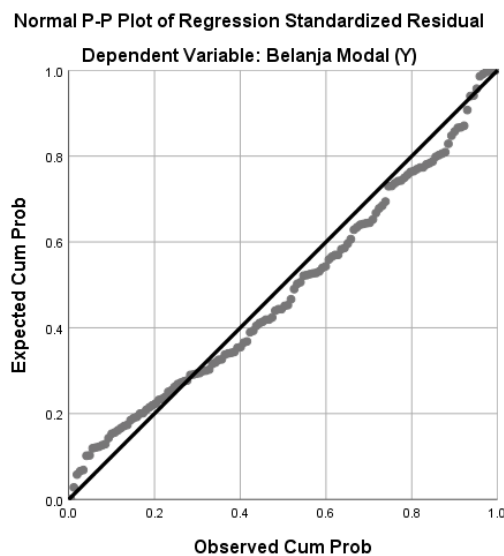
Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini untuk mengambil kesimpulan data berdistribusi normal dengan menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* dan *Normal Probably Plot. Kolmogrov-Smirnov Test*. Pada uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

**Tabel 4. Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	259337.5606541
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.064
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198 ^c

Berdasarkan hasil *output* dari uji normalitas *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) Unstandardized Residual* sebesar $0,198 > 0,05$, hal ini mengartikan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil *output* dari uji normalitas *Normal Probably Plot. Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikutinya, sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat hubungan antara *error* pengganggu periode ini dengan pengganggu periode sebelumnya pada model regresi. Jika ada hubungan atau korelasi dari perhitungannya, maka terdapat masalah autokorelasi. Pengujian autokorelasi dideteksi dengan uji *Durbin-Watson* dengan model regresi $dU < dW < 4-dU$.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.795 ^a	.632	.621	263267.14148	1.834

Berdasarkan uji *Durbin-Watson*, nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,340. Pembanding menggunakan nilai sig. 5%, jumlah sampel (n) 136 dan jumlah variabel bebas 4 (k=4). Nilai dU yaitu 1,7808 lebih kecil dari nilai dW yaitu 1,834, kemudian nilai dW lebih kecil dari (4-dU) yaitu 2,2192. Jadi, $dU < dW < 4-dU = 1,7808 < 1,834 < 2,2192$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam data ini.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel bebas atau independen (X_1, X_2 dan X_3) dan moderasi (M) pada model regresi. Pengujian multikolinearitas dideteksi dengan uji regresi yang dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	630337.807	70804.476		8.903	.000		
PAD (X1)	3.904E-8	.000	.775	11.319	.000	.600	1.668
DAU (X2)	1.724E-7	.000	.293	3.220	.002	.339	2.949
DAK (X3)	-6.411E-8	.000	-.327	-3.467	.001	.315	3.172
PE (M)	15348.844	5780.436	.145	2.655	.009	.946	1.057

Berdasarkan hasil uji tersebut, VIF pada variabel Pendapatan Asli Daerah $1,668 < 10$ dan *tolerance* $0,600 > 0,1$. Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU), VIF $2,949 < 10$ dan *tolerance* $0,339 > 0,1$. Selanjutnya, pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) VIF $3,172 < 10$ dan *tolerance* $0,315 > 0,1$. Terakhir, pada variabel pertumbuhan

ekonomi VIF 1,057 < 10 dan *tolerance* 0,946 > 0,1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menunjukkan ketidaksamaan variance pada analisis regresi. Penelitian yang dinilai baik dari analisis regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas penelitian ini menggunakan *uji Glejser* dengan meregresikan nilai absolute residual (AbsUi) terhadap variabel bebas dan moderasi.

Tabel 7. Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	112525.475	45134.393		2.493	.014
	PAD (X1)	-1.389E-9	.000	-.069	-.632	.529
	DAU (X2)	6.645E-8	.000	.283	1.947	.054
	DAK (X3)	-2.290E-8	.000	-.292	-1.943	.054
	PE (M)	5033.772	3684.745	.119	1.366	.174

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,529, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,054, Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,054, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,174. Ini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan untuk semua variabel lebih dari 0,05 sehingga penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ialah analisis yang berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Qomusuddin & Romlah, 2021). Berdasarkan uji analisis regresi linear berganda, maka menghasilkan persamaan model regresi sebagai berikut.

Model Regresi I

$$Y = 653.690,652 + (3,952 \times 10^{-8})X_1 + (2,005 \times 10^{-7})X_2 + (-7,512 \times 10^{-8})X_3 + \varepsilon$$

Uji Analisis Moderasi Regresi (*Moderated Regression Analysis/MRA*)

Pada penelitian ini juga melakukan uji analisis moderasi regresi yang bertujuan untuk menguji variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen (Liana, 2019). Berdasarkan uji analisis moderasi regresi, maka menghasilkan juga persamaan model regresi sebagai berikut.

Model Regresi II

$$Y = 722.696,483 + (2,982 \times 10^{-8})X_1 + (1,431 \times 10^{-7})X_2 + (-3,693 \times 10^{-8})X_3 + (2,855 \times 10^{-9})X_1M + (1,374 \times 10^{-8})X_2M + (-1,181 \times 10^{-8})X_3M + \varepsilon$$

Berdasarkan model regresi tersebut, analisis moderasi regresi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 722.696,483 menunjukkan tanda positif yang memiliki makna ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), interaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pertumbuhan ekonomi setara dengan nol maka memengaruhi belanja modal memiliki nilai 722.696,483.
2. Koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar $2,982 \times 10^{-8}$ memiliki makna ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0, maka belanja modal akan bertambah sebesar $2,982 \times 10^{-8}$.
3. Koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar $1,431 \times 10^{-7}$ memiliki makna ketika Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0, maka belanja modal akan bertambah sebesar $1,431 \times 10^{-7}$.
4. Koefisien variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar $-3,693 \times 10^{-8}$ memiliki makna ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0, maka belanja modal akan berkurang sebesar $-3,693 \times 10^{-8}$.
5. Koefisien variabel interaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar $2,855 \times 10^{-9}$ memiliki makna ketika interaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0, maka belanja modal akan bertambah sebesar $2,855 \times 10^{-9}$.
6. Koefisien variabel interaksi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar $1,374 \times 10^{-8}$ memiliki makna ketika interaksi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pertumbuhan ekonomi meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0, maka belanja modal akan bertambah sebesar $1,374 \times 10^{-8}$.
7. Koefisien variabel interaksi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar $-1,181 \times 10^{-8}$ memiliki makna ketika interaksi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pertumbuhan ekonomi meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0, maka belanja modal akan berkurang sebesar $-1,181 \times 10^{-8}$.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan atau tidak signifikan. Taraf signifikansi (Sig.) dalam uji $t < 0,05$, jika nilai t hitung $> t$ tabel, maka terdapat

pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai t tabel taraf signifikansi, $df = n - k - 1$ dengan n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel, $136 - 5 - 1 = 130$, maka nilai t tabel sebesar 1,657.

Tabel 8. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	660968.615	70814.351		9.334	.000
	PAD (X1)	2.982E-8	.000	.592	5.858	.000
	DAU (X2)	1.431E-7	.000	.243	2.354	.020
	DAK (X3)	-3.693E-8	.000	-.189	-1.444	.065
	PAD (X1)*PM (M)	2.855E-9	.000	.299	2.708	.008
	DAU (X2)*PM (M)	1.374E-8	.000	.243	2.631	.010
	DAK (X3)*PM (M)	-1.181E-8	.000	-.304	-2.929	.004

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8, maka deskripsi hasil pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hasil Uji t menunjukkan t_{hitung} dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada posisi positif dengan nilai 5,858 artinya $> t_{tabel}$ dengan nilai 1,657 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) **berpengaruh positif signifikan** terhadap belanja modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hasil Uji t menunjukkan t_{hitung} dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berada pada posisi positif dengan nilai 2,354 artinya $> t_{tabel}$ dengan nilai 1,657 dan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima**, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) **berpengaruh positif signifikan** terhadap belanja modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hasil Uji t menunjukkan t_{hitung} dari variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berada pada posisi negatif dengan nilai -1,444 artinya $< t_{tabel}$ dengan nilai 1,657 dan nilai signifikansi $0,065 > 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) **tidak berpengaruh** terhadap belanja modal, maka **H3 ditolak**.
4. Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Hasil Uji t menunjukkan t_{hitung} dari interaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi positif dengan nilai 2,708 artinya $> t_{tabel}$ dengan nilai 1,657 dan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa **H4 diterima**, yaitu pertumbuhan ekonomi

berpengaruh positif signifikan dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.

- Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hasil Uji t menunjukkan t_{hitung} dari interaksi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi positif dengan nilai 2,631 artinya $> t_{tabel}$ dengan nilai 1,657 dan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa **H5 diterima**, yaitu pertumbuhan ekonomi **berpengaruh positif signifikan** dapat memoderasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal.

- Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Hasil Uji t menunjukkan t_{hitung} dari interaksi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi positif dengan nilai -2,929 artinya $> t_{tabel}$ dengan nilai 1,657 dan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa **H6 diterima**, yaitu pertumbuhan ekonomi **berpengaruh negatif signifikan** dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh signifikan variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Nilai F_{tabel} taraf signifikansi 0,05, df_1 (jumlah variabel-1) dengan $5-1= 4$ dan df_2 (jumlah data-jumlah variabel) dengan $136-5= 131$, maka F_{tabel} sebesar 2,44.

Tabel 9. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	16372030554997.783	6	2728671759166.297	42.486	.000 ^b
Residual	8285105533719.639	129	64225624292.400		
Total	24657136088717.420	135			

Hasil uji F menunjukkan F_{hitung} sebesar 42,486 yang artinya lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,44 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Kemudian, pertumbuhan ekonomi juga secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif signifikan dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar persentase belanja modal (Y) yang ditentukan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 10. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.664	.648	253427.74965

Hasil Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa R adalah nilai korelasi berganda dengan angka sebesar 0,815. Nilai *R square* (R^2) sebesar 0,664. Lalu, koefisien determinasi yang telah disesuaikan yaitu 0,648 dan *Std. Error of the Estimate* 253.427,74965. Oleh karena itu, hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan Koefisien determinasi *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,648 atau 64,8%, maka artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), interaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pertumbuhan ekonomi memengaruhi belanja modal sebesar 64,8%, sedangkan sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini.

Pembahasan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini mengindikasikan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka belanja modal juga akan semakin tinggi secara signifikan. Sebaliknya, apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka belanja modal juga akan semakin rendah secara signifikan. Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020–2023 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi di tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, meskipun meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diikuti dengan kenaikan belanja modal di provinsi tersebut.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Hadisantoso et al. (2023), Ramadiana (2024), dan Metekohy et al. (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar pula anggaran belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan daerah, khususnya sarana dan prasarana. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber penerimaan penting yang memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya turut meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggali potensi daerahnya agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada maupun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru sesuai

dengan ketentuan yang ada, serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Gerungan, 2024).

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini mengindikasikan semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka belanja modal juga akan semakin tinggi secara signifikan. Sebaliknya, apabila semakin rendah Dana Alokasi Umum (DAU) maka belanja modal juga akan semakin rendah secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan laporan APBN tahun 2020-2021 yang mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah selama pandemi COVID-19, khususnya saat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan menggantikan sebagian peran PAD dalam membiayai belanja modal. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang rutin dan fleksibel memungkinkan pemerintah daerah tetap melaksanakan pembangunan meskipun dalam kondisi darurat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Bawono (2023) dan Fahrezi et al. (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berperan penting sebagai cadangan fiskal yang bisa digunakan untuk proyek infrastruktur. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki ketimpangan keuangan, namun di sisi lain pemerintah daerah memerlukan dana yang sangat tinggi untuk melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh masing-masing daerah cenderung berbeda tergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah, namun semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan maka semakin besar pula alokasi untuk belanja modal untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan daerahnya (Dalil, 2020).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada suatu provinsi tidak memiliki dampak terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan laporan APBN tahun 2020-2023 yang mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selama pandemi COVID-19 difokuskan pada penanganan dampak pandemi, terutama di sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Akibatnya, alokasi untuk belanja modal menurun. Selain itu, ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyesuaikan prioritas dan manajemen pemerintah daerah yang kurang tepat dalam mengatur alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) turut memperburuk penurunan kapasitas belanja modal daerah.

Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari & Fadli (2024) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus sesuai

prioritas nasional harus tetap memperhatikan ketentuan dan ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada praktiknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak terbatas untuk belanja modal, tetapi juga digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebutuhan spesifik daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Huda & Sumiati (2019) menyatakan pemerintah daerah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam jumlah yang cukup besar, namun pemanfaatannya belum didukung oleh tata kelola yang efektif untuk mendorong pembangunan daerah. Sebagian besar Dana Alokasi Khusus (DAK) justru dialokasikan untuk belanja pegawai, bukan untuk mendanai belanja modal. Adapun penelitian yang dilakukan Cindriyanti et al. (2024) yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia memberikan porsi lebih besar pada Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dibandingkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Hal tersebut membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena proporsi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik rendah.

4. Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Alvaro & Adhi (2020) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi bisa memperkuat atau memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, semakin besar kemungkinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan belanja modal. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat bisa memengaruhi peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk juga meningkat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sanjaya & Helmy (2021) juga menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal, di mana pertumbuhan ekonomi yang baik akan berpengaruh langsung terhadap besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, pemerintah daerah dapat memaksimalkan belanja modal untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pembangunan daerah berupa infrastruktur, sarana dan prasarana, serta aset tetap lainnya. Oleh karena itu, Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan adanya tren pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahun, sehingga belanja modal dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan di daerah tersebut dari (Zainuddin, 2020)

5. Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan sehingga Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini et al. (2021) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat bertujuan untuk mendukung keuangan daerah dalam menjalankan desentralisasi. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk membelanjakan modalnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka Dana Alokasi Umum (DAU), serta belanja modal pun juga meningkat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Haq & Syamsuddin (2024) dan Solikah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada sebuah daerah dapat meningkatkan kekuatan fiskal suatu daerah yang memengaruhi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang didapat suatu daerah. Jika Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka belanja modal juga akan meningkat. Hal ini tentu memengaruhi peningkatan fasilitas publik, prasarana, dan infrastruktur dalam upaya pembangunan daerah.

6. Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan sehingga Pertumbuhan Ekonomi dapat memperlemah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Meutia et al. (2022) dan Alvaro & Adhi (2020) mengungkapkan jika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya. Hal ini dilakukan pemerintah daerah untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional lainnya selain belanja modal. Artinya, tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan tetapi memperlemah pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) pada belanja modal. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada belanja modal semakin menurun.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Widiasmara (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif

signifikan sehingga Pertumbuhan Ekonomi dapat memperlemah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk belanja modal. Hal ini disebabkan karena penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disusun dan dibahas pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2023.
2. Terdapat pengaruh positif signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2023.
3. Tidak terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2023.
4. Terdapat pengaruh positif signifikan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2023.
5. Terdapat pengaruh positif signifikan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi dengan memperkuat Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2023.
6. Terdapat pengaruh negatif signifikan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi namun memperlemah Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2023.

SARAN

Berdasarkan analisis dan simpulan dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang berguna bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah terutama pada kondisi darurat.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan dan menggali kembali potensi daerahnya sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai kemandirian fiskal daerah, lebih siap dan bijak apabila menghadapi perubahan relokasi anggaran untuk menyesuaikan kondisi darurat, serta memiliki manajemen atau tata kelola keuangan yang baik guna

memaksimalkan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah pada sektor publik.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih komprehensif dan mendalam dengan memperluas cakupan data, baik secara geografis mencakup seluruh provinsi termasuk yang baru, maupun secara temporal dengan menambah periode sebelum dan sesudah Covid-19. Selain itu, peneliti disarankan untuk mempertimbangkan fokus pada pemerintah daerah tertentu agar memperoleh gambaran yang lebih spesifik, serta memasukkan variabel lainnya yang relevan seperti Dana Bagi Hasil, SILPA, IPM, dan luas wilayah. Penggunaan metode penelitian yang beragam juga dianjurkan untuk memperoleh hasil yang lebih komparatif dan akurat terhadap kondisi APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy and Practice*, 13(6), 1842-1865. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Alvaro, R., & Adhi, P. (2020). The Effect Of Regional General Income and Balancing Fund on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating Variable in Provinces of Indonesia. *Jurnal Budget*, 5(2), 103-120. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.102>
- Assyifa, B. S. A., & Muttaqin, A. A. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Nusa Tenggara Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 16-28. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.2>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 164-174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>
- Cahyaning, S. (2018). The Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on Capital Expenditures Allocation with Economic Growth as Moderating Variabels in East Regency/City Government 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Dalil, A., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 178-184. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598>
- Dini, S., Florentina, B. S., Saribu, D. Y. B. D., & Hutagalung, J. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

- Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 1118-11137. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i2.1254>
- Elwarin, L. F. E., Hasan, K., & Akhmad Tahir, M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019. *Jurnal Widyagama National Conference on Economics and Business*, 2(1), 455-464. <https://doi.org/10.31328/wnceb.v2i1.3180>
- Fahrezi, F., Hasanah, N., & Ulupui, I. gusti K. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 2(1), 141-157. <https://doi.org/10.21009/japa.0201.09>
- Gerungan, H. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi (Neraca)*, 2(2), 598-606. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i2.1063>
- Hadi, S., & Mahi, B. R. (2024). Peran Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi terhadap Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 9(1), 25-42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i1.670>
- Hadisantoso, E., Arifuddin, A., Wawo, A. B., & Ridwan, Muh. (2023). The Influence of Original Local Government Revenue, Specific Allocation Fund on Government Capital Expenditures in Southeast Sulawesi Disrict/City. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3712-3720. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1937>
- Haq, M. I., & Syamsuddin. (2024). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 22(1), 22-36. <https://doi.org/10.19184/jauj.v22i1.38737>
- Himawan, H. S. (2022). Original Local Government Revenue Influenced by the Number of Tourists, Restaurants, and Hotels in Province of Central Kalimantan. *Balance: Journal of Islamic Accounting*, 3(1), 39-56. https://doi.org/10.21274/balance_vol3no1_39-56
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 85-100. <https://doi.org/10.21009/wahana.014.1.6>
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA*, 8(3), 335-341. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, & Fahlevi, H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 1–18.
- Kresna Pramudya, F., Faisal Abdullah, M., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, F. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal. 17(4), 653–660. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Maharani, A. Z., Annundi, S. A., Wulansari, W. W., Susanti, I. A., & Ardhiarisca, O. (2024). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 65–74. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1416>
- Mayasari, C., & Fadli. (2024). The Effect of Local Original Revenue (PAD), Special Allocation Fund (DAK) and General Allocation Fund (DAU) on Capital Expenditure in Bengkulu Province. *Journal of Economic, Business & Accounting Research*, 2(1), 44–57. <https://doi.org/10.61511/jembar.v2i1.2024.794>
- Metekohy, S., Dharmawan, D., Harahap, I., & Munizu, M. (2024). Analysis Of Regional Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund And Economic Growth On The Local Government Capital Expenditure. *International Journal of Economics Development Research*, 5(2), 1375–1389. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i2.5016>
- Meutia, T., Junita, A., & Husna, I. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi di Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(2), 162–175. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i02.216>
- Prabowo, S., & Bawono, I. R. (2023). The Affecting of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund on Capital Expenditures in Central Java. *Jurnal Akuntansi*, 18(2), 121–131. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i2.8336>
- Putri, N. F., Indriani, R., & Rahmadini, D. (2024). Effectiveness of Local Revenue and Balance Funds on Capital Expenditure in Indonesian Local Government. *Jurnal Akuntansi & Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.31289/jab.v10i1.10791>
- Ramadiana, Y. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal*

Kumpulan Informasi Dan Artikel Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi (KINDAI), 20(1), 34-47. <https://doi.org/10.35972/kindai.v20i1.1163>

Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 450-469. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.369>

Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183-194.

Solikhah, T., Hidayat Riyanto, W., & Primita Sari, N. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Financial Economics & Investment*, 4(2), 71-82. <https://doi.org/10.22219/jofei.v4i2.32854>

Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45-56. <https://doi.org/10.22515/jifa.v2i1.1594>

Zainuddin, Mufadhhal, M. F., & T. Makmur. (2024). Dampak Pendapatan Asli Daerah Dimediasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 8(4), 1404-1410. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3059>